



# **PEMBANGUNAN PARIWISATA MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA EKONOMI DAN LINGKUNGAN**



Maharani & Suherman



# **PEMBANGUNAN PARIWISATA**

**ANTARA MENJAGA KESEIMBANGAN  
EKONOMI DAN LINGKUNGAN**

**MAHARANI  
&  
SUHERMAN**

# **PEMBANGUNAN PARIWISATA: ANTARA MENJAGA KESEIMBANGAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN**

## **Penulis:**

Maharani dan Suherman

ISBN : 978-623-92952-4-0

Cetakan Pertama, April 2023

Ukuran Buku: 14 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: I + 76 Halaman

## **Penyunting:**

Baiq Titis Yulianty

## **Desain Sampul:**

Herman Rakha

## **Desain Isi:**

Herman Rakha

Diterbitkan oleh:

### **Lombok Research Center**

Jl. Raya Mataram-Masbagik KM. 45

Perumahan Bumi Catra Regency Blok B3 No. 8 Semat,

Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - NTB

Buku ini tidak untuk kegiatan komersialisasi. Mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi harus dengan seizin dari Lombok Research Center selaku penerbit.

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini dengan judul “Pembangunan Pariwisata, Antara Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan”.

Pariwisata menjadi salah satu sektor penting yang saat ini dijadikan sebagai andalan dalam pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai pembangunan infrastruktur pariwisata terus dilaksanakan namun, di satu sisi secara posisi geografis Provinsi NTB merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia, terutama bencana alam hidrometeorologis.

Untuk itu, apabila pembangunan dan pengembangan pariwisata di NTB tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap lingkungan, bahkan dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan sektor pariwisata itu sendiri.

Buku yang berjudul “Pembangunan Pariwisata: Antara Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan” ini merupakan buku yang membahas mengenai pariwisata NTB, terutama pasca beroperasinya KEK Mandalika yang telah memberikan pengaruh terhadap pembangunan pariwisata di seluruh wilayah NTB.

Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca, khususnya para praktisi pariwisata dan pengambil kebijakan, dalam mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata.

Kami berterima kasih kepada penulis, yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangan positif bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Salam hormat,  
**Lombok Research Center**

# DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	I
Belakang Halaman Judul.....	II
Kata Pengantar.....	III
Daftar Isi.....	V

## **BAGIAN I**

Gotong Royong Pariwisata Di NTB .....	1
Konflik Agraria Di Kawasan Pariwisata NTB .....	7
Desain Ulang Desa Wisata, Perlukah?.....	21
Aji Mumpung Menaikkan Tarif Hotel.....	29
Pemerintah Pusat Mengarahkan Penonton MotoGP Ke Bali, Pemda NTB Kemana? .....	35

## **BAGIAN II**

Potensi Dan Peluang Pariwisata Lombok Timur.....	39
Tantangan Lingkungan Dalam Membangun Desa Wisata berkelanjutan Di Lombok Timur .....	45
Pariwisata Setengah Hati Di Lombok Timur.....	53
BPPD Dan Tantangan Pariwisata Lombok Timur ....	59
Belajar Dari Kegagalan Desa Tete Batu Dalam Kompetisi UNWTO .....	65
Air Dan Pariwisata : Tantangan Dan Peluang.....	71



**BAGIAN SATU**



# GOTONG ROYONG PARIWISATA DI NTB



**P**andemi Covid-19 telah mempengaruhi sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB). Kebijakan pembatasan perjalanan yang dilakukan serta kontak sosial berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke NTB secara umum maupun terhadap kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata yang ada di NTB khususnya. Data dari

Dinas Pariwisata Provinsi NTB menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang pada tahun 2020 sebesar 400.595 wisatawan. Jumlah kunjungan tahun 2020 ini sangat jauh menurun dibandingkan kunjungan wisatawan tahun sebelumnya yaitu 3,7 juta lebih wisatawan pada tahun 2019 dan 2,8 juta lebih pada tahun 2018.

Masyarakat NTB terutama yang ada di

pedesaan pada umumnya kurang siap, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghadapi suatu krisis yang berkepanjangan, seperti krisis yang disebabkan oleh Covid-19 ini. Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat pedesaan, antara lain seperti, faktor usia, tingkat pendapatan masyarakat di desa yang masih rendah, keragaman ekonomi yang relatif masih kurang, kemudian adanya kesenjangan digital serta jarak dari pusat kesehatan.

The United Nation World Tourism Organization (UNWTO) meramalkan bahwa ke depan pasca Covid-19 pertumbuhan pariwisata domestik akan lebih dulu stabil dibandingkan dengan pariwisata internasional. Untuk itu, Lombok Research Center (LRC) berharap tata kelola desa wisata yang ada di seluruh wilayah NTB lebih ditingkatkan, karena akan menguntungkan masyarakat pedesaan yang menjadi lokasi desa wisata. Apabila hal ini dapat dipraktikkan maka, akan menjaga mata pencaharian masyarakat yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi lokal.

Masuknya Desa Tete Batu, Kabupaten Lombok Timur mewakili Indonesia dalam ajang Penghargaan Desa wisata dunia memberikan angin segar baru bagi pariwisata di NTB. Acara yang digelar tahunan oleh UNWTO ini merupakan ajang bergengsi di dunia pariwisata dunia.

Masuknya Desa Tete Batu sontak membuat Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Timur seolah-olah bangun dari tidurnya. Koordinasi gerak cepat dilakukan oleh pemerintah daerah. Bahkan, dalam dua minggu terakhir gubernur dan wakil

gubernur pun datang langsung berkunjung ke Desa Tete Batu dengan membawa personil lengkapnya.

Dengan datangnya secara langsung gubernur dan wakil gubernur ke Desa Tete Batu mendorong semua pihak untuk turut serta bergotong royong dalam mensukseskan Desa Tete Batu menjadi juara di tingkat Dunia.

Pembangunan pariwisata dengan penguatan gotong royong mutlak dilakukan. Adanya kerjasama dari semua lapisan untuk kepentingan dan tujuan bersama. Dalam konsep gotong royong di Desa Tete Batu ini, masyarakat setempat harus menjadi pelaku utama. Hal ini dilakukan untuk memberikan peluang bagi para petani dan masyarakat setempat lebih memanfaatkan suatu lahan untuk dijadikan tempat atau wadah tempat wisata yang melibatkan masyarakat dalam pembangunannya.

Dengan adanya gotong royong diharapkan semua masyarakat ikut serta dalam pengembangan tempat wisata, yang mana nantinya memberi dampak positif bagi masyarakat itu sendiri. gotong royong ini bukan hanya sebagai bentuk kegiatan kerja tetapi mempererat rasa kebersamaan. Selain itu, gotong royong juga menjadi salah satu bentuk melestarikan budaya yang sudah ada sejak turun temurun.

Adanya keikutsertaan masyarakat untuk secara bersama-sama membangun dan mengelola wisata ini disebut pengembangan desa wisata dengan konsep **Community Based Tourism (CBT)**. CBT merupakan konsep pengembangan wisata yang memberikan kesempatan penuh bagi masyarakat lokal untuk mengontrol dan

terlibat dalam seluruh kegiatan sehingga tercipta pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Melalui konsep ini maka diharapkan pengembangan wisata yang dilakukan berdasarkan pada aspirasi, dilaksanakan dengan keterlibatan penuh dari masyarakat dan memberikan manfaat utamanya pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam CBT menjadi penting untuk diukur dalam rangka mengetahui sejauh mana keterlibatan masyarakat sehingga keputusan mengenai tindak lanjut kebijakan pengelolaannya menjadi semakin jelas.

Sebagai subyek utama dalam industri wisata, masyarakat memiliki hak yang mutlak secara utuh terhadap pengembangan wilayahnya sebagai destinasi wisata sehingga masyarakat memegang peran sebagai pengontrol bentuk, pengembangan dan pengelolaan pariwisata di daerahnya. Di sisi lain, masyarakat sebagai pelaku memiliki pandangan tersendiri terkait dengan pariwisata berbasis masyarakat ini. Mereka beranggapan bahwa pengembangan pariwisata di daerahnya diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi pendapatan keluarganya.

Dalam beberapa kajian yang dilakukan oleh Lombok Research Center menyebutkan bahwa pariwisata mampu memberikan manfaat dalam bentuk penguatan ekonomi lokal, yang antara lain berupa adanya peningkatan nilai tambah produk local, adanya peningkatan perputaran uang di daerah, pendapatan tambahan kepada masyarakat, serta peluang pekerjaan yang dapat ditangkap oleh masyarakat.

Dari sisi pelaku dan pegiat pariwisata, gotong royong akan memberikan model pola kerjasama dan kolaborasi antar pihak. Pariwisata ini merupakan ladang mencari nafkah bersama. Sehingga jika menginginkan ladang ini terus menghasilkan, maka lahan ini harus dijaga bersama.

Langkah bersama antar pegiat dan pelaku pun sudah mulai dilakukan. Asosiasi homestay di bawah komando Bapak Ahyak bahkan sudah mendesain 7 langkah strategis yang harus dilakukan bersama. Ketujuh langkah strategis ini berbasis lokal.

Adapun tujuh langkah strategis ini yaitu; 1) Membangun Teamwork yang kuat, Fokus dan hindari konflik internal; 2) Penyiapan yang terukur dan terarah; 3) Observasi unikasi dan keunggulan diri; 4) Observasi unikasi dan keunggulan kompetitor; 5) Proyeksi tingkat probabilitas kemenangan; dan 6) Penyiapan strategi alternatif berdasarkan perkembangan perubahan dan yang terakhir; 7) Peanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Tujuh strategi ini diperoleh dari hasil diskusi, pengalaman empiris dari para pelaku dan pegiat selama menjalankan bisnis dalam bidang pariwisata.

Pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya didalam mendukung pengembangan desa wisata diharapkan fokus pada fasilitas pendukung yang diperlukan oleh Desa Tete Batu. Dalam kunjungan langsungnya ke Desa Tete Batu, Wakil Gubernur NTB menegaskan semua pihak harus terlibat dan bergerak cepat dalam rangka mempersiapkan Desa Wisata Tete Batu menjadi juara. Segala persiapan baik infrastruktur, fasilitas dan sarana prasarana dan pendukung lainnya

harus segera diselesaikan.

Pemerintah Provinsi NTB akan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memastikan indikator yang mendukung penilaian desa wisata segera diselesaikan. Termasuk kesiapan masyarakat desa untuk bahu membahu dalam mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan lestari.

Infrastruktur dasar yang harus tersedia antara lain tempat sampah dan MCK, akses jalan dan petunjuk rute menuju desa wisata yang masih kurang. Yang terakhir yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengelolaan desa wisata adalah bagaimana menghadirkan suasana alam yang akan membuat wisatawan yang datang berkunjung merasakan rileks serta dapat melupakan dari beban rutinitas kesehariannya.

Mari jadikan Desa Tete Batu sebagai embrio untuk bangkit bersama. Desa Tete Batu kita jadikan mimpi bersama untuk membangun model kolaborasi multi pihak dalam pembangunan pariwisata di daerah kita. Dan mari sebagai masyarakat, pelaku, pegiat dan pemerintah kita kibarkan bendera merah putih di NTB, jangan kita kibarkan bendera putih seperti di daerah lain, dan hanya untuk kesejahteraan bersama.

# KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN PARIWISATA



**W**usa Tenggara Barat (NTB), memulai fokus membangun pariwisata sejak era 1970-an. Hal tersebut ditandai dengan datangnya wisatawan baik asing maupun nusantara ke sejumlah pulau-pulau kecil di pesisir barat Lombok. Umumnya para pelancong ini merupakan wisatawan yang berlibur ke Bali dan menjadikan Lombok sebagai tempat persinggahan untuk kemudian kembali lagi ke Bali sebelum pulang ke negara mereka masing-masing.

Meskipun, pariwisata semakin digenjut sebagai penopang perekonomian,

pembangunan pariwisata di NTB tidak lantas menyelesaikan masalah kesejahteraan yang ada. Bahkan meninggalkan beberapa permasalahan social baru terutama terkait dengan permasalahan agraria.

Di beberapa kawasan Pariwisata sering timbul masalah pertanahan berupa sengketa tanah, administrasi pertanahan, serta mafia tanah dan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tidak hany bersinggungan dengan pemerintah dalam hal ini Kementrian Kehutanan, juga banyak bersinggungan dengan masyarakat langsung. Hal ini terkait

dengan kawasan adat ataupun kawasan perhutanan sosial.

Selain itu, dengan dimulainya atau seiring implementasi program prioritas pembangunan Kabinet Kerja yang menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 20 juta turis asing pada 2019 dan berlanjut sampai tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau “10 New Bali”.

## Konflik Agrarian di NTB



Seperti diketahui izin lokasi bertujuan mengarahkan calon investor (pengusaha) untuk membangun dilokasi tanah yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW). Dengan tujuan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara optimal. Sehingga dengan berbekal ijin lokasi para pengusaha dapat melakukan usaha-usaha perolehan dan hak atas tanahnya yang kemudian dilanjutkan dengan realisasi penggunaannya sesuai dengan peruntukan ijin lokasinya.

Dengan adanya Penyederhanaan prosedur perijinan khususnya ijin lokasi yang sejalan dengan pesatnya perkembangan kegiatan pembangunan di NTB, maka banyak menarik minat investor untuk menanamkan modalnya sehingga menimbulkan dampak positif bagi kemajuan pembangunan secara ekonomi dan social.

Pembangunan sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan dari pembangunan sektor lainnya, banyak diminati oleh para investor sebagai bidang usaha yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah ijin lokasi dengan peruntukan pariwisata yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan NTB dengan berbagai macam bentuk ijin. Banyaknya jumlah ijin lokasi yang diterbitkan pada sektor ini menunjukkan kecendrungan besarnya minat investor untuk menanamkan modalnya, tetapi ternyata belum semua ijin lokasi dengan peruntukan untuk pariwisata yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan NTB khususnya pada lokasi yang ditunjuk sebagai kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya tanah-tanah yang terlantar, penguasaan tanah/lahan tidur dan penyimpangan dari rencana penggunaan tanahnya.

Masyarakat Lombok pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya yang sebagian besar

beragama Muslim dalam melaksanakan pembangunan menganut sistem keseimbangan pembangunan dengan lingkungannya yang disebut dengan hubungan manusia dengan sang maha pencipta dan hubungan manusia dengan manusia termasuk didalamnya dengan alam. Hal ini agar dapat dicapai kesejahteraan dan kedamaian dalam menikmati hasil pembangunan, jadi dalam hal pengadaan dan pembangunan sarana pariwisata perlu memperhatikan masalah-masalah sosial budaya dan masalah lingkungan.

Upaya perolehan hak atas tanah dan pembangunan sarana pariwisata oleh pengusaha pada kawasan-kawasan yang ditunjuk untuk kawasan pariwisata, mengakibatkan terjadinya perubahan penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan itu. Namun ada kalanya status penguasaan tanah dan realisasi penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan proposal permohonan semula sehingga hal ini dapat menimbulkan keresahan (tanah terlantar).

Sebelum Amandemen, Penjelasan Pasal 33 alinea 4 Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD) berbunyi : *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Kemudian dituntaskan secara kokoh di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104 atau disebut juga Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA) Atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD dan Pasal 2 UUPA serta penjelasannya, pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”,

melainkan hak yang memberi wewenang kepada Negara untuk menguasai seperti hal tersebut di atas.

Berdasarkan hak penguasaan atas tanah, negara mengatur jenis hak yang dapat dimiliki oleh Subyek Hak antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 UUPA.

Menurut *Soedikno Mertokusumo*, wewenang yang dipunyai pemegang hak atas tanah adalah: a. Wewenang Umum. Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. b. Wewenang Khusus. Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya.

Akan tetapi di lapangan, berbagai konflik sumber daya alam, termasuk konflik lahan semakin tinggi intensitasnya. Konflik tersebut terjadi dengan cakupan wilayah, pihak yang terlibat dan dampak yang semakin luas dan dalam. Kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh masih adanya ketimpangan distribusi lahan. Sengketa dan/atau konflik tersebut bahkan telah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Sebagai contoh yang lagi hangat yaitu konflik agraria di NTB yaitu kasus tanah di Gili terawangan di Lombok

Utara dan Sembalun Lombok Timur. Penyelesaian permasalahan perjanjian kontrak produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pengusahaan lahan di pulau Gili Trawangan, cukup menyedot perhatian masyarakat dan pemerhati social. Bahkan pemerintah daerah pun sempat meminta masukand arti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri investasi untuk penyelesaian terbaik kasus ini.

Lahan yang menjadi subyek sengketa antara PT GTI dengan masyarakat memiliki luas 65 hektar. Lahan tersebut dipegang oleh PT GTI sejak tahun 1995 dengan status Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT GTI Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 12 April 1995.

Namun, diakhir penghujung tahun 2021 yang lalu, masyarakat dapat sedikit lega dengan dikeluarkannya surat oleh Satgas Percepatan Investasi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Satgas Percepatan Investasi yang memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB mengakhiri Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 12 April 1995 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan diputusnya perjanjian kerjasama membuat kejelasan status lahan itu semakin jelas. Dimana posisi msyarakat. Bahkan Gubernur memberikan hak kelola bagi masyarakat lokal. Dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Masyarakat local diberikan keleluasaan untuk mempergunakan lahan yang ada untuk tujuan ekonomi.

Berbeda dengan konflik lahan yang terjadi di Kecamatan Sembalun Lombok Timur. Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan sudah terjadi sejak ijin dikeluarkan. Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan mengeluarkan ijin Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT. Sembalun Kusuma Emas (PT. SKE).

Praktik negaranisasi tanah adat membuat Orde Baru begitu mudahnya merubah status tanah adat menjadi tanah negara dan dikonsesikan pada perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU). Sebagaimana yang dialami oleh PT. Sembalun Kusuma Emas (SKE), di bawah pimpinan Ibu Tien Soeharto, pada tahun 1988 memperoleh konsesi HGU di atas lahan hak ulayat masyarakat seluas 155,6 hektar. Pada tahun 1989 kembali memperoleh konsesi lahan HGU di atas pemukiman penduduk seluas 183 hektar. Penguasaan lahan PT. SKE terus bertambah sampai dengan luasan 555 hektar.

Tidak semua lahan dikuasai oleh PT. SKE diolah menjadi lahan produktif, terdapat 185 hektar lahan itu pada tahun 1999 HGU nya beralih pada PT. Sampoerna Agro yang digunakan sebagai areal pembangunan Green House Hortikultura untuk pasar ekspor, meski prakteknya juga untuk pasar lokal. Sisa lahan lainnya menjadi lahan PT. SKE lainnya menjadi lahan tidur. Sejak tahun 1995, warga empat desa di Kecamatan Sembalun menggarap lahan tidur seluas 225 hektar PT. SKE itu untuk bercocok tanam, sampai kemudian muncul keributan pada tahun 2013, saat perusahaan melakukan pematokan kembali lahan yang digarap warga dan meminta warga untuk tidak lagi menggarap lahan tersebut. Warga yang menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut menjadi

marah dan melakukan demonstrasi di Kantor Kecamatan Sembalun.

Setelah tahun 2013 ketegangan antara masyarakat Sembalun dengan PT. SKE mulai mereda namun, kondisi itu tidak berlangsung lama. Di penghujung 2021 konflik antara masyarakat Sembalun dengan PT. SKE kembali terjadi. Hal ini dipicu oleh terbitnya izin HGU kepada PT. SKE oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Maret 2021 di atas lahan dengan luas 150 hektar yang terbagi dalam dua lembar sertifikat (sebelumnya PT. SKE telah mengajukan izin pada 2009 dan 2014). Masyarakat kemudian melakukan penghentian aktivitas pemagaran atau pemasangan patok yang dilakukan oleh PT. SKE.

Masyarakat masih menganggap terbitnya sertifikat HGU tersebut sebagai cacat prosedur dimana, hanya berdasarkan pada pembebasan lahan tahun 1990 dan izin lokasi. Selain itu, dibiarkannya tanah yang mendapatkan izin lokasi tanpa dilakukan pengelolaan dianggap sebagai bukti bahwa PT. SKE tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya HGU PT. Agrindo Nusantara Nusantara yang sebelumnya adalah PT Sampoerna Agro di atas objek lahan yang merupakan objek izin lokasi PT SKE. Masyarakat mengklaim bahwa PT. SKE cenderung menjadi makelar tanah daripada pengusaha.

## **Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik**

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Konflik artinya percekcoan,

perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan.

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam beberapa hal, penggunaan istilah konflik dan sengketa seringkali disamaratakan arti dan penggunaannya. Ditinjau dari ilmu sosiologi, konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.

Menurut Lawing, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya.

Konflik agraria yang terjadi di Kecamatan Sembalun terjadi karena terdapat perbedaan persepsi antara warga masyarakat dengan perusahaan dalam hal ini PT. SKE. Warga masyarakat merasa bahwa lahan yang saat ini menjadi objek sengketa atau konflik yang saat ini ada sebagian yang masih dipegang dan digarap oleh masyarakat adalah warisan nenek moyang atau leluhurnya. Sedangkan di sisi lain, perusahaan (PT SKE) bersikukuh bahwa berdasarkan Izin baru hak guna usaha (HGU) tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB, pada Bulan Maret 2021, melalui Surat Keputusan Nomor: 001/SKHGU/BPN.52.HP/III/2021, dan Surat Keputusan Nomor: 002/SKHGU/BPN.52.HP/III/2021.

Perbedaan cara pandang tersebut beberapa kali menimbulkan konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, berbagai institusi negara berupaya dengan berbagai pertemuan dan kegiatan untuk menyelesaikan konflik agraria, akan tetapi sampai dengan sekarang belum bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Mengatasi permasalahan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah merupakan program prioritas pemerintah didalam mewujudkan reforma agraria. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria dan sesuai amanat Perpres tersebut, dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional. Untuk itu, pemerintah membentuk suatu Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA mulai dari tingkat pusat, tingkat Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota yang beranggotakan dari berbagai sektor.

Untuk di tingkat pusat, GTRA diketuai oleh Menteri ATR/kepala BPN dan sebagai pelaksana hariannya adalah Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN. Sedangkan di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota diketuai oleh kepala daerah yang dalam hal ini adalah gubernur atau bupati/walikota dengan wakil ketua adalah seorang sekretaris daerah dari masing-masing tingkatan pemerintahan daerah. Kemudian untuk pelaksana hariannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah/Badan Pertanahan BPN. Untuk GTRA Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTB No.590-425 Tahun 2020.

Meskipun tugas serta fungsinya adalah untuk melaksanakan program reforma agraria namun, GTRA

juga memiliki peran untuk dapat menyelesaikan sengketa dan konflik agraria. Mengingat konflik agraria merupakan persoalan yang krusial dan kompleks maka, sangat dibutuhkan komunikasi antar lembaga pemerintah dan melibatkan Civil Society Organization (CSO) didalam proses percepatan penyelesaian konflik agraria serta tidak lupa untuk melakukan program inventarisasi konflik, penanganan dan penyelesaian konflik serta redistribusi tanah.

Bahkan pada 11 September 2020 Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mendukung pemberdayaan terhadap subyek reforma agraria melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5093/SJ. Adapun instruksi tersebut berisi tentang :

1. Inventarisasi subyek dan identifikasi potensi lokasi penerima TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).
2. Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat antar organisasi perangkat daerah
3. Penyediaan infrastruktur pendukung sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah termasuk penyediaan sarana, pengembangan modal dan pemasaran.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat penerima sertifikat tanah

Dimana instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut harus terintegrasikan di dalam RPJMD, RKPD, dan APBD

masing-masing tingkata pemerintahan daerah.

## **Menjaga Kondusifitas Pariwisata di NTB**

Dua tahun ini Lombok secara khusus dan NTB secara umum sedang menjadi gadis “Seksi” bagi pengembangan dunia pariwisata. Banyak investor local maupun luar daerah mulai melirik untuk mau terlibat berinvestasi di NTB.

Ini merupakan khabar baik bagi daerah dan Indonesia. Jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain jika ingin ekonomi tetap stabil, maka daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang baik.

Iklim investasi yang baik membutuhkan kombinasi kebijakan seperti mengurai hambatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, transportasi hingga pembangkit tenaga listrik. Hubungan seperti pelabuhan dan bandara serta koneksi internet untuk ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 juga patut diperhatikan. Selain pembangunan fisik, keseimbangan dan keserasian hubungan antara pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah, pengusaha dan masyarakat local pun harus terjaga dengan baik.

Iklim investasi yang baik pun harus didukung peraturan. Pemerintah Pusat telah mensimplifikasi prosedur investasi dengan One Single Submission (OOSS), tinggal bagaimana Pemerintah daerah NTB mampu menterjemahkannya dalam hal yang lebih teknis sesuai dengan kondisi daerah. Upaya ini memungkinkan investor tidak perlu mendatangi berbagai Kementerian/

Lembaga baik di pusat ataupun pemerintah daerah untuk mengurus perijinan.

Tidak hanya itu, isu Sumber Daya Manusia (SDM) terutama, SDM lokal harus menjadi hal yang penting. NTB memiliki banyak tenaga kerja, namun untuk mendapatkan yang terlatih dan terdidik sangat terbatas karena kapasitas mereka belum optimal, nah disinilah peran pemerintah daerah NTB untuk dapat mempercepat pembangunan SDM lokal yang handal.

Di bidang fiskal, pemerintah memberikan insentif pajak dan insentif belanja. Insentif pajak contohnya tax holiday, tax allowance, exemption import, tax free import duty. Pada insentif belanja, contohnya mendorong belanja pada sektor-sektor tertentu, menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk area efisiensi produksi.

Masyarakat di sekitar Destinasi Tujuan Wisata (DTW) harus dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung. Selain itu, tentunya mereka juga dapat ikut menciptakan iklim pariwisata yang kondusif. Melibatkan masyarakat lokal dalam semua aktifitas pembangunan khususnya pariwisata akan memberikan kekuatan moril dan menjadikan masyarakat merasa memiliki setiap aktifitas pembangunan yang ada. Keseimbangan iklim investasi dan kondusifitas daerah akan berdampak kepada lancarnya aktifitas ekonomi di daerah.



# DESAIN ULANG DESA WISATA, PERLUKAH?



Salah satu program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan pendapatan masyarakat adalah melalui pengembangan Desa Wisata. Program unggulan ini dimaksudkan sebagai upaya Pemprov NTB didalam pelestarian lingkungan dan alam serta budaya masyarakat. Adanya program pengembangan desa wisata

juga diharapkan menjadi sarana pemerintah daerah untuk mendistribusikan pembangunan serta pemerataan ekonomi dengan tetap mengedepankan konsep pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi sektor pariwisata NTB. Kebijakan pembatasan perjalanan yang dilakukan serta kontak sosial berdampak pada penurunan jumlah

kunjungan wisatawan ke NTB secara umum maupun terhadap kunjungan wisatawan ke desa-desa wisata yang ada di NTB khususnya. Data dari Dinas Pariwisata Prov. NTB menyebutkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang pada tahun 2020 sebesar 400,595 wisatawan. Jumlah kunjungan tahun 2020 ini sangat jauh menurun dibandingkan kunjungan wisatawan tahun sebelumnya yaitu 3,7 juta lebih wisatawan pada tahun 2019 dan 2,8 juta lebih pada tahun 2018.

Euforia pariwisata dalam konteks lokal ditunjukkan dengan tumbuhnya desa wisata. Pemerintah Provinsi NTB melalui *Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB No. 050.13-366/2019* telah menargetkan hingga tahun 2023 setidaknya sudah ada 99 desa wisata NTB Gemilang sebagai *pilot project* di dalam pengembangan desa wisata lainnya di seluruh wilayah NTB. Dalam konteks pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi maka, peran pariwisata dalam pembangunan pedesaan semakin relevan. Adanya pandemi Covid-19 telah memberikan dampak terhadap perubahan perilaku masyarakat didalam bepergian, dimana saat ini wisatawan cenderung untuk mencari tujuan wisata yang bersifat massal dan lebih memilih tujuan wisata yang dapat memberikan pengalaman serta kegiatan di alam terbuka.

## **Desa Wisata di NTB**

Pembangunan Desa Wisata yang masuk dalam program unggulan NTB Gemilang tentunya memberikan angin segar bagi pemerataan ekonomi di NTB. Desa wisata dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan alam,

budaya dan masyarakat. Untuk membangun desa wisata setidaknya memenuhi 3 syarat ([www.kemparekraf.go.id](http://www.kemparekraf.go.id)) yaitu; (1) Melihat potensi yang ada di desa, (2) Terdapat minat dan kesiapan masyarakat terhadap pengembangan destinasi wisata setempat, dan (3) Konsep desa wisatanya yang harus unik. Bagi Lombok Research Center (LRC) ketiga syarat tersebut sangat sangatlah penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan, mengingat berbagai isu kritis tentang desa wisata.

Hal ini tentunya menjadi tantangan terkait dengan pengembangan desa wisata di NTB dimana, kerentanan terhadap duplikasi konsep desa wisata satu dengan yang lain masih ditemukan ada kesamaan karena pembedanya yang mudah ditiru. Keterlibatan masyarakat secara umum yang masih kurang terkadang menyebabkan keberadaan desa wisata kurang mampu untuk mengeksplorasi *local wisdom* sebagai faktor penguat keberadaan dari pengembangan desa wisata. Selain itu, pengembangan desa wisata yang mengeksploitasi sumber daya namun kurang memperhatikan keberlanjutan, dan terakhir yaitu potensi masuknya investor yang dapat menjadikan masyarakat hanya sebagai objek.

Lombok Research Center (LRC) juga masih banyak melihat desa wisata di NTB dalam pengembangannya menduplikasi konsep desa wisata lainnya di Indonesia yang lebih dulu eksis seperti, desa wisata yang menyediakan spot foto (instagramer), aktivitas hacking, bersepeda, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Tidak salah memang desa wisata yang mengembangkan konsep tersebut untuk menarik wisatawan datang ke desa namun, yang perlu lebih dikedepankan adalah bagaimana

setiap desa wisata di NTB mampu mengembangkan *story telling* yang sesuai dengan konsep desa wisata.

Pengembangan dengan konsep *story telling* ini akan menjadi penguat, karena cerita akan lebih mudah diingat oleh wisatawan yang datang. LRC belum melihat desa wisata yang menjual paket wisata berupa kegiatan budaya seperti latihan menari, pembuatan souvenir, membaca daun lontar, dan berbagai aktivitas lainnya yang akan meningkatkan *length of stay* wisatawan. Selain itu pemilihan materi promosi juga perlu untuk diperhatikan, terutama bagaimana mendeskripsikan tentang keindahan alam desa dalam media promosi, tentang kearifan lokal yang dapat ditemui apabila wisatawan datang ke desaa wisata tersebut, pusat-pusat interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal serta berbagai interest lainnya.

## **Pariwisata, Pembangunan Pedesaan, dan COVID-19**

Masyarakat NTB terutama yang ada di pedesaan pada umumnya kurang siap baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menghadapi suatu krisis yang berkepanjangan, seperti krisis yang disebabkan oleh Covid-19 ini. Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan masyarakat pedesaan, antara lain seperti, faktor usia, tingkat pendapatan masyarakat di desa yang masih rendah, keragaman ekonomi yang relatif masih kurang, kemudian adanya kesenjangan digital serta jarak dari pusat kesehatan.

The World Tourism Organization (UNWTO) meramalkan bahwa ke depan pasca Covid-19 pertumbuhan pariwisata domestik akan lebih dulu stabil

dibandingkan dengan pariwisata internasional. Untuk itu, Lombok Research Center (LRC) berharap tata kelola desa wisata yang ada di seluruh wilayah NTB lebih ditingkatkan, karena akan menguntungkan masyarakat pedesaan yang menjadi lokasi desa wisata. Apabila hal ini dapat dipraktekan maka, akan menjaga mata pencaharian masyarakat yang tentunya akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi lokal.

Secara umum, desa wisata yang ada di NTB tidak terlepas dari sektor pertanian. Adanya pandemi ini tentunya berdampak terhadap keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari produk pertanian dan disaat yang sama sumber penghidupan masyarakat pedesaan tersebut berada di bawah ancaman perubahan iklim yang terjadi. Sehingga, diharapkan pengembangan desa wisata yang dikelola sesuai dengan konsep desa wisata dapat memenuhi kebutuhan wisatawan terkait dengan pengalaman baru yaitu seputar alam pedesaan, budaya dan produk lokal, interaksi masyarakat yang semua itu memberikan peluang besar bagi upaya revitalisasi ekonomi masyarakat pedesaan pasca pandemi.

Salah satu contoh cara yang dapat dikembangkan oleh desa wisata untuk menarik minat wisatawan datang berkunjung adalah melalui pemanfaatan kearifan lokal berupa panganan tradisional yang ada. Makanan lokal yang menjadi “jualan” bagi desa wisata akan mempercepat proses pemerataan ekonomi di desa, karena akan mendukung sektor pertanian dan produsen lokal. Dalam skema besar, cara ini akan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja.

Terkadang masih banyak pola pikir pengelola desa wisata yang menyajikan pelayanan akomodasi makanan menyesuaikan dengan kebiasaan wisatawan terutama wisatawan mancanegara. Bagi LRC, pola-pola seperti itu tidak sesuai dengan konsep desa wisata yaitu menawarkan suatu pengalaman yang unit dan bersifat pengetahuan. Penyajian makanan lokal juga dimaksudkan untuk meminimalisir potensi sampah yang bersumber dari bungkus bahan-bahan makanan yang digunakan. Hanya dengan menerapkan praktik berkelanjutan bagi masyarakat lokal, pengunjung dan industri pariwisata dapat memenuhi persyaratan untuk mengatasi tantangan saat ini tanpa membahayakan masa depan.

Penciptaan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi yang menjadi tujuan pengembangan desa wisata juga harus selaras dengan promosi dan upaya pelestarian alam dan budaya. Perkembangan teknologi informasi dan pembatasan sosial yang mengikuti protokol kesehatan harus dibarengi dengan kemampuan para pengelola desa wisata untuk bertransformasi ke arah digital didalam mempromosikan desa wisatanya.

Selain transformasi digital, para pengelola desa wisata juga harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya terutama dalam aspek pengembangan keterampilan. Pemerintah daerah harus membantu desa-desa wisata terkait dengan akses ke lembaga keuangan, kemudian mendukung desa wisata melalui pembangunan berbagai infrastruktur penunjang, dan lain sebagainya. Semua itu harus menjadi prioritas didalam perencanaan pembangunan pariwisata di pedesaan

sebagai upaya pemulihan pariwisata di desa dan menjadi daya dukung atau pedoman menghadapi krisis dimasa yang akan datang.

## **Apa Yang Harus Dilakukan?**

Tata kelola pengembangan desa wisata harus dapat menyatu dan harmonis, dimana pengembangan desa wisata harus menyesuaikan dan mengarah pada kekhasan utama yang dimiliki oleh desa wisata, bukannya malah menduplikasi konsep desa wisata lainnya yang belum tentu sesuai dengan karakter masyarakat dan kondisi lingkungan dari desa wisata tersebut. kekhasan dan lingkungan alam yang ada apabila dikembangkan dapat menjadi ecotourism ke depannya.

Kemudian, yang harus dilakukan pada masa pandemi Covid-19 ini adalah tersedianya berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi kriteria protokol kesehatan namun tetap mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas. Keberadaan protokol yang ketat memang akan membuat ketidaknyamanan namun, hal itu harus tetap dilaksanakan meskipun kriteria keamanan tersebut harus tetap menyertakan kenyamanan. Aman dan nyaman akan menjadikan warga masyarakat serta wisatawan yang berkunjung akan menjadi santai dan rileks didalam menjalankan aktivitas, tanpa harus abai terhadap protokol kesehatan yang berlaku.

Selama ini pengelolaan desa wisata di NTB secara umum lebih didominasi oleh keberadaan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan peduli terhadap pariwisata, sehingga seringkali terjadi resistensi dengan

pemerintahan desa. Untuk itu, kedepannya segala aktivitas pariwisata di desa harus dilakukan secara swakelola. Kriteria swakelola penting untuk dirumuskan karena pengembangan wisata desa membutuhkan keterlibatan warga secara aktif karena pihak yang paling berkepentingan untuk pengembangan adalah warga desa sendiri.

Tidak semua desa wisata yang ada di NTB mampu diakses secara mudah terutama terkait dengan upaya mempromosikan desa wisatanya. Informasi mengenai rute menuju ke desa wisata juga sangat minim sehingga, banyak desa-desa wisata yang ada pengembangannya seolah jalan di tempat. Seharunya desa wisata mampu memanfaatkan akses informasi melalui kerjasama dengan biro-biro jasa wisata yang ada serta memanfaatkan media sosial maupun media online agar mempermudah wisatawan untuk mengetahui kekhasan dari desa wisata yang dikelola.

Pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya didalam mendukung pengembangan desa wisata hanya fokus pada fasilitas sampah dan MCK saja namun, akses jalan dan petunjuk rute menuju desa wisata yang masih kurang. Yang terakhir yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengelolaan desa wisata adalah bagaimana menghadirkan suasana alam yang akan membuat wisatawan yang datang berkunjung merasakan rileks serta dapat melupakan dari beban rutinitas kesehariannya.

# AJI MUMPUNG MENAIKKAN TARIF HOTEL



Sebulan terakhir ini, perbincangan di kalangan pelaku pariwisata masih hangat seputar harga kamar hotel yang melambung tinggi. Harga hotel yang melambung tinggi bertepatan dengan pergelaran event MotoGP Maret 2022. Banyak yang kecewa terhadap kebijakan dari Himpunan pengusaha hotel ini, termasuk pemerintah daerah pun ikut menyoroti hal ini.

Melihat kekisruhan ini, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sampai mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi.

Pergub ini dikeluarkan tidak lain untuk mengatur batas atas dan batas bawah tarif kamar penginapan saat MotoGP Mandalika 2022.

Pada kesempatan lain, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi juga menegaskan bahwa Pergub ini diterbitkan untuk menyikapi lonjakan harga kamar dan penginapan jelang perhelatan akbar balap dunia MotoGP. Pemerintah daerah wajib menjaga iklim usaha dan menciptakan suasana yang baik dalam setiap event internasional. Kepastian kepada masyarakat terkait harga penginapan dan juga membuka kesempatan lebih luas masyarakat menonton event internasional dimana, hal ini tentunya terkait dengan nama dan citra NTB sebagai tuan rumah.

Dalam Pergub ini juga mengatur terkait dengan bagaimana penyedia akomodasi diperkenankan menaikkan harga dengan batas yang sudah diatur sesuai zona di mana lokasi event berlangsung, yaitu maksimal kenaikan tarif kamar tiga kali. Untuk zona yang lebih luar kenaikan tarif maksimal dua kali dan zona terjauh dari area event kenaikan maksimal satu kali.

Selain itu, khusus bagi agen travel juga dapat menjual tiket maupun penginapan dengan sistem bundling dengan catatan tidak menjual dengan harga mahal. Masalah tarif harga sewa transportasi juga akan disiapkan regulasi. Khusus mengenai hal ini regulasinya sedang dikaji agar dapat menampung kepentingan semua pihak. Agar tidak ada yang terzolimi. Dikarenakan tujuan diadakan event di NTB yaitu untuk dapat dimanfaatkan oleh semua pihak.

Tidak hanya Pemerintah Provinsi NTB yang

langsung merespon adanya kondisi ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun merespon langsung kondisi ini. Bahkan dalam kesempatan kunjungan langsungnya, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno menyampaikan kepada semua pihak agar jangan “Aji Mumpung” menaikkan harga hotel.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata NTB ketersediaan kamar untuk MotoGP Mandalika adalah 23.889 kamar, baru terisi 45 persen. Di beberapa zona/kawasan tingkat pemesanan hotel sudah penuh seperti di Kawasan Mandalika, Mataram dan Senggigi. Sedangkan di kawasan lain, seperti Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air dari 6.000 kamar, baru terisi hanya 2.000 kamar. Begitu juga di tempat-tempat lain, seperti Wilayah Lombok Utara dan Lombok Timur, masih ada ribuan kamar yang kosong.

Namun, kebijakan Pergub ini tidak serta merta diterima oleh beberapa kalangan. Tidak hanya pengusaha Hotel dan penginapan yang menolak. Bahkan beberapa anggota Dewan Perwakilan daerah (DPRD) Provinsi NTB juga melakukan penolakan.

Salah satu politisi dari Golkar yang sekaligus sebagai pegiat pariwisata Misbah dalam suatu kesempatan malah menganggap Pergub yang dikeluarkan oleh Gubernur NTB sia-sia. Hal ini dikarenakan ketersediaan kamar hotel di Lombok dengan estimasi jumlah penonton dalam gelaran MotoGP mencapai 100 ribu. Sementara ketersediaan kamar hotel di NTB khususnya dipulau Lombok hanya sekitar 20 ribu kamar lebih.

Sehingga dalam artian bahwa, ini merupakan

kesempatan emas bagi pengusaha untuk mengatur rumah tangganya. Biarkan pengusaha menawarkan apa yang dimilikinya dengan harga yang ditawarkan, yang penting ada yang membeli, tujuan akhirnya juga untuk kesejahteraan.

Kesejahteraan dalam arti bahwa keuntungan tidak hanya didapatkan oleh pemilik penginapan atau hotel semata. Jika ada kelebihan pendapatan, karyawan lain juga akan menikmatinya. Sebab naiknya harga kamar hotel di kala event seperti ini juga berdampak pada karyawan. Tidak hanya untuk pemilik hotel, karena selain gaji yang diterima mereka juga mendapatkan bonus dari manajemen hotel, bahkan mendapat tips tambahan dari pengunjung hotel.

Salah satu pengusaha hotel di Mataram memberikan contoh ketika event berskala internasional digelar di berbagai negara misalnya, di Malaysia maupun di Singapura atau event nasional di Jakarta dan Papua, tidak ada yang meributkan soal surat edaran. Bahkan Pergub untuk mengatur standar tarif harga hotel.

Dalam kondisi ini penulis mengajak semua pihak untuk melihatnya secara jernih dan dari berbagai sudut pandang. Agar semua pihak tidak ada yang dirugikan. Tarif merupakan nilai suatu jasa pelayanan yang ditetapkan dengan ukuran sejumlah uang berdasarkan pertimbangan bahwa dengan nilai uang tersebut sebuah hotel bersedia memberikan jasa kepada pelanggan.

Tarif dapat ditetapkan dengan berbagai tujuan sebagai berikut; 1) Penetapan Tarif untuk Pemulihan Biaya. Biaya yang ditetapkan mampu mengembalikan

modal awal yang berupa aset tetap maupun bentuk modal lainnya; 2) Penetapan Tarif untuk Meningkatkan Akses pelayanan. Biaya yang ditetapkan bisa memberikan manfaat kepada publik berupa produk berbentuk barang maupun jasa; 3) Penetapan Tarif untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan. Biaya yang ditetapkan biasa meningkatkan kinerja manajemen untuk memberikan pelayanan kepada konsumen berupa barang maupun jasa dan; 4) Penetapan Tarif untuk Tujuan Lain. Biaya yang ditetapkan diperuntukkan untuk dana pengaman yang nantinya dimanfaatkan untuk keperluan operasional lainnya dalam perusahaan (Trisnantoro,2005).

Sehingga cara menentukan tarif pun banyak. Berdasarkan tujuan dan tentunya agar pengusaha mendapatkan keuntungan yang layak dan sesuai. Tanpa mengurangi tingkat pelayanan maupun jasa yang diberikan. Yang jelas bahwa, Lombok secara khusus dan NTB secara umum baru kali ini menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan event internasional sekelas MotoGP. Sebagai tuan rumah kita harus saling berbenah dan bahu membahu untuk memberikan pelayanan yang baik. Agar citra yang ditinggalkan nantinya bahwa kita sebagai tuan rumah pun baik. Kita tidak boleh meninggalkan citra yang buruk. Baik terhadap teknis penyelenggaraan acara maupun pada soal pelayanan kita sebagai tuan rumah bagi para tamu dan penonton.

Event internasional ini, tidak hanya menjadi rebutan bagi propinsi atau daerah lain di Indonesia. Bahkan menjadi rebutan bagi negara lain. Ini merupakan kesempatan emas bagi kita masyarakat NTB dan bagi pemerintah Daerah untuk menunjukkan kepada dunia

bahwa NTB mampu dan siap. Tanpa meninggalkan kesalahan sekecil pun. Kesalahan pasti ada, namun mari kita meminimalisir bersama karena tujuan dari rangkaian dan proses pembangunan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sekali lagi penulis menegaskan bahwa tidak ada yang menjadi pihak terzalimi, baik pelaku, pengusaha, pemerintah ataupun masyarakat lokalnya. Mari kita jadikan kekisruhan ini untuk mau duduk bersama dan berlapang dada. Sekali lagi demi NTB dan demi Indonesia.

# PEMERINTAH PUSAT MENGARAHKAN PENONTON MOTOGP KE BALI ! PEMDA NTB KEMANA ?



Sumber :ANTARA/Ahmad Subaidi

Foto udara kompleks Hotel Pullman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kuta, Lombok Tengah, NTB

**K**emertian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) mengeluarkan kebijakan dalam bentuk promosi dan kebijakan program lainnya terkait dengan untuk mengarahkan wisatawan menginap di Bali jika kapasitas akomodasi tidak cukup untuk menampung mereka selama gelaran MotoGP 2022 di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 18-20

Maret 2022.

Promosi ini langsung di posting di akun instagramnya Kementerian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kebijakan ini sudah melalui pertimbangan dan analisa yang matang dari Tim Kementerian. Dilihat dari jarak, banyaknya akomodasi dan kesiapan transportasi baik darat, laut dan udara.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi

dan Infrastruktur Vinsensius Jemadu dalam beberapa kesempatan di media mengatakan kementeriannya bakal memfasilitasi fast boat atau kapal cepat dari Bali ke Lombok untuk wisatawan yang akan menonton perhelatan balap motor internasional itu. Hanya saja, Vinsen menggarisbawahi langkah itu diambil jika fasilitas hunian di Lombok tidak lagi mampu menampung wisatawan.



Selain itu, Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif sudah bekerjasama dengan pengelola jaringan hotel kapsul waralaba Bobobox dan PT Eigerindo Multi Produk Industri atau Eiger Indonesia untuk menyediakan hunian dengan konsep camping ground yang dapat menampung 600 orang.

Adapun, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memproyeksikan penonton yang berasal dari luar negeri dan domestik untuk gelaran balap MotoGP tahun ini mencapai 100.000 orang. Hanya saja, total akomodasi yang terpasang dari hotel, penginapan hingga desa wisata

di KEK Mandalika hanya 23.000 unit per Desember 2021.

Kemenparekraf belakangan tengah berusaha untuk menambah kapasitas hunian dengan menggunakan kapal terapung di kawasan Gili Tramena yang terhubung langsung dengan Mandalika. Sebelumnya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mendapatkan komitmen investasi senilai Rp17 triliun dari investor yang akan mengembangkan dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata. Data dari ITDC mencatat beberapa investor seperti Master Land Utilization & Development Agreement (Luda), Vinci Construction Grands Projets (VCGP) yang berinvestasi senilai US\$1 miliar atau Rp14 triliun.

### **Kemana Pemda NTB?**

Sejak kawasan Mandalika ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menjadi kawasan ekonomi Khusus (KEK), pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mulai berbenah. Percepatan pembangunan ekonomi yang merata adalah salah satu tujuan Pemerintah Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah-wilayah ini ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usulan dari Badan Usaha dan Pemerintah Daerah.



**BAGIAN DUA**



# POTENSI DAN PELUANG PARIWISATA LOTIM

*M*asyarakat Pulau Lombok seharusnya bersyukur dan selalu bersyukur, dengan keindahan alam Lombok dari Sang Pencipta membawa banyak berkah tidak hanya bagi dunia pariwisata, namun juga untuk hal lainnya.

Adanya Gunung Rinjani yang elok, membuat jutaan orang bermimpi untuk mendakinya. Keindahan bawah laut berbagai gili yang ada disekitar pulau Lombok, membuat berdecak kagum jutaan pasang mata, dengan cepat dikenal ke berbagai penjuru dunia, salah satunya akibat promosi baik berbayar atau gratis melalui internet. Semua itu kemudian mendatangkan 'traffic' manusia ke Lombok, yang membawa banyak peluang bisnis di pulau seribu masjid ini.



Pariwisata masih menjadi sektor menarik untuk terus dikembangkan. Potensi alam, budaya, dan kuliner Indonesia masih memiliki nilai jual yang tinggi baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.

Lalu, bagaimana dengan Lombok Timur? Lombok Timur merupakan daerah yang diapit oleh dua kawasan pembangunan ekonomi skala prioritas Nasional. Di sebelah barat dan berbatasan langsung yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan perhelatan Motogp sebagai event mercusuaranya. Di sebelah Timur ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bajo dengan Taman Nasional Komodo sebagai daya tariknya.

Melihat dua gelombang besar pembangunan tersebut, seharusnya sejak dini Kabupaten Lombok Timur mulai berbenah. Persiapan sumberdaya manusia, infrastruktur dan pola pikir masyarakat sejak awal dipersiapkan.

Tidak hanya sebatas wacana, kebijakan dalam bentuk regulasi yang mendukung dan program yang langsung terkait ke arah pengembangan dunia pariwisata sudah harus dibuat. Sekarang kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021, dan jika dalam tahapan pembangunan kita sudah masuk pada semester kedua pembangunan. Jika ingin berbuat masih ada anggaran perubahan dan anggaran murni tahun 2022.

Jangan hanya jadikan peluang KEK Mandalika hanya sebagai bahan pidato dan diskusi-diskusi. Harus ada tindakan nyata. Potensi kita sudah begitu banyak. Dikalangan kelembagaan masyarakat, hanya Lombok Timur yang memiliki POKDARWIS sampai 80 lebih. Dan

hanya Lombok Timur yang memiliki Home Stay sampai 120 anggota lebih.

Kemauan dan keinginan nyata dari masyarakat sudah dimulai. Tinggal keinginan serius pemerintah daerah sampai sejauh mana. Masyarakat membutuhkan pemerintah daerah sebagai penggerak. Untuk menggerakkan roda pembangunan ini lebih kencang lagi.

Untuk tahun 2021 ini, memang pemerintah daerah Lombok Timur sudah merencanakan beberapa pembangunan infrastruktur terkait Lombok Timur sebagai kawasan penyangga. seperti melakukan pembersihan kawasan pantai Teluk Ekas sepanjang 1300 m x 30 m untuk ruang terbuka. Selanjutnya akan dibuat Jalan / Trotoar sepanjang 1300 m x 2 m. Pembersihan lokasi area parkir, lapak dan musholla seluas 70 are. Pembersihan area bermain seluas 50 are, pembersihan dan penataan ruang untuk relokasi Rumah sebanyak 15 KK yang terkena radius 30 meter dari pantai. Pembukaan jalan lingkaran baru/lanjutan mulai dari Dusun Ekas-Makam Tompok-ompok dan Dusun Tenges-enges sepanjang 1 km.

Jelas, orang yang datang ke Lombok Timur saat ini banyak didominasi untuk tujuan wisata. Ada pula yang ke Lombok Timur untuk agenda bisnis, melamar anak gadis, menghadiri undangan teman dan sebagainya.

Namun prosentase tujuan kehadiran ke Lombok Timur adalah untuk tujuan wisata. Maka selain usaha yang sudah biasa di dunia pariwisata, ada beberapa usaha yang potensi terbesar dimiliki oleh Lombok Timur. Usaha penyedia jasa paket wisata Lombok adalah jenis usaha utama yang mendapatkan banjir order dari kejadian ini.

Tak heran jika banyak travel agen berdiri di Lombok, bahkan sebagian ada yang dimiliki oleh orang luar negeri yang melihat peluang bisnis pariwisata di Lombok ini. Selain agen wisata Lombok, usaha apakah yang ikut maju dengan adanya potensi wisata yang luar biasa ini?

## **Hotel dan Penginapan**

Banyaknya orang yang datang dan berkunjung untuk keperluan apa saja, tentu membutuhkan banyak tempat untuk beristirahat. Setelah seharian bekerja atau berwisata, maka badan butuh istirahat cukup agar bisa melanjutkan perjalanan wisata di hari berikutnya. Maka sangat rasional jika usaha hotel dan penginapan dibutuhkan oleh wisatawan. Di Lombok Timur sendiri, berdiri banyak jaringan hotel, mulai dari kelas melati hingga berbintang, walaupun bintangnya belum banyak.

Banyak investor dari luar negeri yang secara khusus membuat hotel di tempat-tempat terbaik, tentu karena mereka punya modal besar untuk melakukan itu, hal yang wajar karena mekanisme ekonomi kapitalisme yang dianut oleh negara ini.

Seperti halnya hotel di Lombok yang memiliki banyak kelas. Penginapan di Lombok Timur pun seperti itu. Ada yang biasa saja, namun ada juga yang eksklusif. Kedepan akan ada banyak guest house yang ada di Lombok Timur, karena menginap di guest house memiliki beberapa keuntungan dibandingkan tinggal di hotel atau penginapan.

## **Industri Kerajinan**

Salah satu andalan wisata lombok adalah handicraft, banyak diantaranya adalah kerajinan tangan kain tenun, Kain tenun lombok mempunyai ciri khas tersendiri yang menjual dipasaran. tidak sedikit wisatawan yang datang ke lombok tidak lupa untuk membawa oleh oleh yang satu ini.

Saat orang pergi ke tempat wisata dimanapun itu, biasanya orang akan membutuhkan 'bukti' bahwa pernah pergi ke tempat tersebut. Karena hanya dengan omongan saja terkadang tidak cukup untuk membuat orang lain percaya. Selain jejak digital di dunia maya seperti status facebook, gambar di instagram, vlog di youtube dan sebagainya, rasanya kurang lengkap tanpa adanya barang khas penanda bahwa kita dari lombok. Maka kemudian muncullah banyak industri kerajinan aksesoris khas Lombok untuk buah tangan wisatawan. Mulai dari gelang, kalung, kaos, jaket, gantungan kunci dan sebagainya.

## **Kuliner dan Oleh-Oleh Khas Lombok**

Makanan adalah kebutuhan mendasar manusia yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena selama masih hidup pasti butuh makan. Meski begitu, manusia tidak ingin sekedar makan, namun juga banyak yang terobsesi makan makanan yang enak. Nah, saat kita pergi ke Lombok, khususnya Lombok Timur banyak yang penasaran untuk mencari tempat makan enak dan khas di Lombok Timur. Maka tak heran jika dunia bisnis makanan Lombok ikut maju seiring dengan banyaknya wisatatawan yang ke Lombok.

Selain itu, para wisatawan juga butuh makanan ringan yang bisa dijadikan oleh-oleh saat berkunjung ke Lombok. Oleh-oleh khas Lombok tentu akan ditunggu oleh sahabat, teman kantor dan keluarga kita dirumah. Maka industri oleh-oleh khas Lombok akan ikut maju sejalan dengan majunya dunia wisata di Lombok.

## **Jasa Transportasi**

Di tempat yang menjadi tujuan wisata populer, kebutuhan akan jasa transportasi menjadi hal yang amat penting. Tak hanya itu, jasa transportasi berupa rental mobil maupun motor juga tumbuh seiring dengan tumbuhnya iklim pariwisata yang baik. Tentu industri transportasi akan menarik banyak lowongan kerja, mulai dari sopir hingga bergerakinya ekonomi seputar dunia otomotif.



## TANTANGAN LINGKUNGAN DALAM MEMBANGUN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI LOMBOK TIMUR

**P**ariwisata saat ini menjadi salah satu sektor 'primadona' di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Terlebih lagi dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di kawasan Kuta Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini bertransformasi menjadi epicentrum baru industri pariwisata dengan sirkuit bertaraf internasional didalamnya.

Prinsip berkelanjutan serta diharapkan menjadi daya ungkit bagi sektor lainnya, pengembangan dan pembangunan pariwisata yang sedang diupayakan diyakini akan memberikan dampak

terhadap penciptaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, yang ujungnya adalah penurunan angka kemiskinan.

Pendapat ini tentunya berdasarkan pada asumsi bahwa KEK Mandalika akan menjadikan pariwisata NTB lebih maju dan dikenal dunia, sehingga banyak wisatawan yang akan datang ke NTB. Kedatangan wisatawan ini pastinya akan mengeluarkan biaya transportasi, biaya akomodasi penginapan serta makanan dimana, semua itu akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor jasa lainnya.

Suka tidak suka saat ini sektor pariwisata telah menjadi primadona baru didalam pembangunan NTB. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, misalnya dengan menggalakkan pengembangan desa wisata, penyelenggaraan acara atau event pariwisata, pembangunan infrastruktur pariwisata dan pendukung dibangun serta ditata yang dimaksudkan agar wisatawan merasa betah berlama-lama di NTB. Semua itu tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak terhadap kontribusi sektor pariwisata pada berbagai aktivitas perekonomian NTB lainnya.

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB saat sedang semangat-semangatnya mengembangkan sektor pariwisatanya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui pengembangan desa wisata. Pemerintah daerah tentunya memiliki asumsi bahwa melalui pengembangan desa wisata maka, harapan dan tujuan dari pemerataan pembangunan ekonomi daerah Lombok Timur dapat diwujudkan. Selain itu, melalui desa wisata diharapkan akan menciptakan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan, ujungnya adalah pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.

Sampai dengan bulan September 2021, setidaknya terdapat 91 desa di Lombok Timur yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai desa wisata. Desa wisata memiliki empat klasifikasi, mulai dari rintisan, berkembang, maju, dan mandiri dengan indikator berupa jumlah kunjungan, industri pariwisata yang berkembang,

kesiapan keterampilan dan sumber daya manusia (SDM), diversifikasi produk dan aktivitas wisata, serta amenities pariwisata.

Untuk dapat dikatakan sebagai desa wisata setidaknya harus dapat memenuhi berbagai unsur, antara lain seperti memiliki objek wisata alam, budaya, wisata buatan/ekonomi kreatif, dan tentunya juga harus didukung oleh adanya atraksi, akomodasi serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Yang paling penting dari desa wisata adalah adanya unsur kearifan lokal serta partisipasi semua unsur masyarakat.

Meskipun banyak manfaat yang akan diperoleh dari pengembangan dan pembangunan desa wisata namun, Lombok Research Center (LRC) melihat juga terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur didalam pengembangan dan pembangunan desa wisata yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan yang akan dikeluarkan.

## **Desa Wisata dan Tata Ruang**

Seiring dengan terus dilakukannya pengembangan desa wisata di Lombok Timur, tentunya sangat diharapkan akan dapat memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi di Lombok Timur, terutama pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak dari pengembangan desa wisata di Lotim terlihat dari keberadaan usaha akomodasi atau homestay di desa-desa yang menjadi desa wisata. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur yang diperoleh melalui <https://data.lomboktimurkab.go.id/> (SIPaDat),

jumlah homestay di Lombok Timur hingga tahun 2019 sebanyak 87 homestay.

Adanya kegiatan atau aktivitas pariwisata di desa, tentunya juga akan memiliki dampak terhadap masyarakat lokal, baik itu dari aspek sosial budaya, ekonomi, maupun dari aspek tata ruang desa yang terjadi karena adanya kebutuhan, nilai serta keinginan dari masing-masing individu didalam menciptakan sebuah ruang sebagai implikasi dari kesesuaian antara ruang fisik dan ruang sosial.

Menurut Haryadi dan Setiawan (2014), ruang merupakan salah satu komponen arsitektur yang berfungsi sebagai wadah kegiatan manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan berbagai kegiatan yang terkait dalam suatu sistem. Keterkaitan wadah-wadah dari kegiatan inilah yang membentuk tata ruang yang merupakan bagian dari bentuk arsitektur.

Dampak dari ruang fisik yang dapat dilihat antara lain adalah adanya perubahan pada tatanan bentuk bangunan, orientasi bangunan, dan perubahan atau pergeseran fungsi ruang dalam rumah yang dijadikan sebagai homestay. Perubahan-perubahan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya adaptasi masyarakat dan para pelaku pariwisata di desa dengan lingkungannya didalam upaya memenuhi fungsi dan status sebagai destinasi perdesaan.

Untuk itu, pemerintah kabupaten Lombok Timur harus segera mempertimbangkan suatu kebijakan mengenai tata ruang desa-desa wisata ini. Hal ini sangat penting mengingat suatu desa wisata, aspek yang paling

utama adalah kerapian sehingga, pemerintah desa yang menjadi desa wisata harus memperhatikan pentingnya tata ruang desa wisata. Untuk itu, pengembangan desa wisata di Lombok Timur sebenarnya tidak harus banyak dari segi jumlah. Meskipun sedikit namun, pengembangan yang dilakukan dapat fokus dan mencapai hasil yang optimal.

Adapun untuk penataan ruang desa wisata di Lombok Timur, Lombok Research Center (LRC) juga melihat bahwa tidak hanya sebatas pada penataan ruang fisik melainkan harus mengarah kepada upaya-upaya pelestarian alam dan lingkungan. Sehingga, sangat diperlukan adanya kontrol semua unsur masyarakat yang ada di desa wisata dalam bentuk partisipasi pada perencanaan desa wisata terutama pada aspek perencanaan ruang.

LRC juga melihat bahwa dengan semakin menggeliatnya sektor pariwisata di “Gumi Patuh Karya”, sedikit tidak mampu menarik investor-investor luar didalam membangun desa wisata. Salah satunya contohnya adalah di wilayah Sembalun dimana, banya bermunculan usaha-usaha homestay atau penginapan yang dari aspek kepemilikannya dimiliki oleh para investor.

David Harvey (2012) menjelaskan bahwa daerah yang diciptakan berbeda melalui produksi simbol-simbol tertentu pada akhirnya akan menarik modal besar untuk berinvestasi yang kemudian mengubah ruang tersebut menuju ke arah yang cenderung lebih seragam. Sederhananya suatu ruang dirubah sedemikian rupa, termaksud kondisi sosial-ekonominya agar sesuai

dengan selera pasar. Warga terpasifikasi, diajari menanti wisatawan datang membawa uang untuk menggerakkan perekonomian setempat.

Kehadiran investor tersebut tersebut telah berdampak terhadap pola pemanfaatan ruang di dalam desa wisata. Untuk itu, LRC terus mendorong agar masyarakat juga berperan aktif didalam upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang didalam desa wisata. Jangan sampai ada penyimpangan dan pelanggaran pemanfaatan ruang yang akan berdampak terhadap degradasi lingkungan, terlebih lagi sebagian besar dari 91 desa wisata di Lombok Timur berada di dalam atau di pinggir kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang menjadi tempat sumber daya air.

## **Ancaman Krisis Air**

Sebagai daerah yang rawan terhadap bencana kekeringan, pengembangan desa wisata di Lombok Timur tentunya juga harus memperhatikan mengenai adanya potensi krisis air bersih yang akan dihadapi. Pada tahun 2020 yang lalu, terdapat 14 kecamatan di Lombok Timur yang mengalami krisis air bersih akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan.

Adanya potensi krisis air bersih akan menjadi suatu ancaman bagi pengembangan desa-desa wisata di Lombok Timur dan dikhawatirkan akan berdampak terhadap ketidaknyamanan bagi wisatawan yang datang berkunjung. Ancaman tersebut juga pastinya akan dirasakan oleh masyarakat lokal yang tinggal di desa

wisata tersebut, yang apabila tidak segera dicarikan solusinya maka, dikhawatirkan juga akan berimplikasi terhadap keinginan masyarakat untuk melakukan migrasi keluar dari desanya.

Industri pariwisata menciptakan kerentanan, salah satunya, dengan memaksa penataan wilayah sesuai dengan selera wisatawan. Pariwisata yang memanfaatkan, originalitas, keunggulan atau keunikan suatu wilayah tidak dapat berlangsung selamanya.

Untuk itu, LRC kembali mengusulkan dan mendorong agar pemerintah Kabupaten Lombok Timur dapat mempertimbangkan keberadaan embung-embung mini didalam setiap desa yang akan berfungsi sebagai penampung suplay air hujan. Selain itu, keberadaan embung-embung mini ini juga dapat menjadi salah satu daya tarik didalam pengembangan desa wisata di Lombok Timur yang dapat diwujudkan dengan cara penataan pemanfaatan lahan yang rapi dan terintegrasi, terutama terhadap produk wisata yang terdapat dalam desa wisata.



# PARIWISATA SETENGAH HATI DI LOMBOK TIMUR



**P**ernyataan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang mengatakan bahwa konsep pembangunan pariwisata di Lombok Timur mengusung konsep wisata WTM. Apa itu WTM?. Pembangunan *Wisata Tanpa Maksiat* merupakan konsep pembangunan pariwisata yang sudah tidak baru lagi. Namun, apakah Kabupaten Lombok Timur dapat menerapkan itu?

Lebih tegas lagi Kepala Dinas Pariwisata mengatakan bahwa jika ada masyarakat yang melanggar hal tersebut maka akan dikenakan sanksi. Karena sejak dahulu Lombok Timur sudah dikenal dengan daerah yang mengedepankan sopan santun dalam berwisata. Seperti apakah maksud dari Bapak Kadispar itu?.

Tidak hanya itu, dalam waktu yang bersamaan, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Lombok Timur melakukan operasi dan penertiban kepada semua pemandu lagu di Cafe Diamond Labuhan Haji.

Dalam operasi tersebut, seluruh pemandu lagu yang bekerja di Lombok Timur khususnya di Labuan Haji ditekankan untuk menggunakan pakaian yang lebih islami. Yang menjadi dasarnya adalah Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2007, tentang Trantibum. Yang lainnya adalah bahwa karakter Lotim yang dikenal dengan budaya Islami.

Oleh sebab itulah, para pemandu lagu di Cafe Diamond sebagai percontohan nantinya bagi cafe-cafe lainnya supaya mereka menggunakan baju yang sopan ketika bertugas. Pakaian tertutup itu juga bertujuan supaya mencegah pemandu lagu berbuat asusila ketika melaksanakan tugasnya.

Berbicara pariwisata, seharusnya pemerintah daerah jangan memandang dari sudut yang sempit. Pariwisata merupakan industri jasa yang cukup menjanjikan. Dalam perkembangannya, industri pariwisata menjadi primadona tersendiri bagi daerah, nasional, maupun tatanan perekonomian global.

Data kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2018 memaparkan bahwa Industri Pariwisata mengalami lonjakan signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Keseluruhan ekspor barang dan jasa Indonesia mengalami kenaikan, yang semula 10% meningkat 17% dan menjadi pendonor terbesar sehingga melesat pada peringkat 4 dengan meraih devisa sebesar 10 miliar USD. Lalu bagaimana dengan Lombok Timur?

Sampai saat ini sektor pariwisata hanya menyumbangkan 1,05% dari PRDB Lombok timur. Itu pun diolah dari pengelolaan makanan dan minuman.

Belum murni dari sector pariwisata. Untuk itu pondasi perencanaan pariwisata yang berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian Lombok Timur Mutlak dilakukan dan Harus mulai dari saat ini.

Secara sederhana pariwisata dapat dimaknai sebagai aktivitas perjalanan ke suatu tempat dalam periode dan untuk tujuan tertentu baik oleh perorangan maupun secara berkelompok. Dalam kamus bahasa Indonesia wisata adalah kegiatan perjalanan secara bersama-sama yang bertujuan untuk menghibur diri, melepas penat, penyegaran kembali (refreshing), menambah wawasan, piknik, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk wisata sangat beragam, diantaranya yaitu wisata panorama (alam), wisata kebudayaan, wisata pendidikan (edu-tourism) dan sebagainya. Wisata alam merupakan destinasi yang sangat erat dengan alam sebagai pangsa utama yang ditawarkan kepada para wisatawan. Misalnya dengan keindahannya, keunikannya, atau bahkan kebersihannya. Sedangkan wisata budaya yang ditawarkan adalah identik dengan sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau pun peninggalan manusia di suatu tempat tertentu.

Biasanya yang berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, pola hidup, situs sejarah, komunikasi sosial dan lain sebagainya. Berbeda dengan keduanya, wisata pendidikan merupakan alternatif destinasi wisata yang memiliki multi peran dimana tidak hanya memberikan hiburan tapi juga memberikan informasi, pemahaman, serta ajaran kepada pengunjungnya.

Seiring perkembangan model industri pariwisata, belakangan ini sudah banyak bermunculan model-model wisata baru yang saling menjual komoditasnya agar laku di pasaran sebagai destinasi wisata unggulan.

Contohnya seperti wisata kuliner yang menjajakan jenis makanan khas daerah tertentu sebagai icon, jenis wisata alam desa konsep lama dengan muka baru misal dengan perpaduan Edu-Tourism, atau jenis wisata religi dengan konsep paket wisata kunjungan makam tokoh-tokoh agama yang sangat berkembang pesat di sebagian besar masyarakat pulau Jawa.

Diantara banyak jenis konsep pariwisata tersebut, satu hal yang juga trend dan sempat menjadi polemik terkait pola pengembangan wisata nasional, yakni konsep pariwisata syariah (Halal Tourism). Asal mula konsep pariwisata syariah berawal saat disebutnya wisata ziarah dan religi (*pilgrims tourism/spiritual tourism*) dalam penyelenggaraan konferensi Organisasi Pariwisata Dunia di Cordoba, Spanyol pada tahun 1967.

Sementara itu, kementerian Pariwisata memproyeksikan beberapa daerah yang berpotensi mempunyai peluang dalam pengembangan wisata syariah dan dapat dijadikan prototipe awal pengembangan wisata syariah nasional.

Lombok Timur merupakan salah satu daerah yang masuk dalam proyeksi pembangunan pariwisata tersebut. Melihat hal itu, seharusnya kita mulai berbenah. Dan jangan memandangi pariwisata dari sudut yang sempit.

Kita harus mulai dari internal kita. Sejauh mana

komitmen pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan pariwisata ini. jangan hanya sekedar jargon saja. Dikarenakan berdasarkan analisa dari penulis bahwa, komitmen ini belum ditunjukkan secara nyata.

Dalam tiga tahun terakhir ini, anggaran untuk dinas pariwisata di Lombok Timur tidak pernah mencapai 5 persen dari total belanja daerah. Bagaimana kita mau membangun. Dari komitmen penganggaran saja tidak pernah serius. Atau jangan-jangan dari internal dinas pariwisata tidak mampu memberikan konsep pembangunan pariwisata yang jelas, sehingga legislative tidak memberikan persetujuan anggaran.

Dikarenakan sector Pariwisata di Lombok Timur merupakan salah satu program penunjang sector ekonomi daerah. Pariwisata di Lombok Timur memiliki prospek ekonomi yang baik sebagai bagian dari industri pariwisata nasional dalam menghadapi berbagai tantangan di era industri 4.0.

Industri wisata ini bertujuan bukan hanya memberikan aspek material, spiritual dan psikologis bagi wisatawan itu sendiri, melainkan juga memiliki kontribusi dalam peningkatan pendapatan pemerintah. Konsep wisata yang mengedepankan budaya lokal Lombok Timur menekankan prinsip-prinsip budaya dalam pengelolaan pariwisata, pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya.

Dalam prakteknya wisata berbasis budaya lokal memilih destinasi wisata yang menjunjung tinggi kaidah sopan santun daerah dan ini menjadi pertimbangan utama. Setiap destinasi wisata di Lombok Timur yang

akan menjadi tujuan harus sesuai dengan kaidah-kaidah budaya setempat.

Karena itu, kerjasama antara pemangku, peneliti, praktisis sebagai pemeta masalah dan membuat strategi pengembangan yang konkret dengan pemerintah dalam mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata di Lombok Timur. Antara lain melakukan pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dan menjadikan pariwisata sebagai salah satu program prioritas kepemimpinan Sukiman Azmi.

Untuk itu mari kita sama sama bangun konsep pariwisata di Lombok Timur yang betul-betul sesuai dengan budaya kita. Jangan kita hanya sekedar latah dan hanya ikut-ikutan saja. Libatkan masyarakat setempat sebagai pelaku, dan pemerintah daerah harus mampu merangkul semua pihak. Jangan pemerintah daerah jalan sendiri, dengan egonya. Sehingga ketimpangan antar pelaku, masyarakat dan pemerintah tidak tampak ke permukaan seperti saat ini. Lombok Timur adalah rumah besar kita bersama, mari kita bangun dan jaga untuk generasi berikutnya.

# BPPD DAN TANTANGAN PARIWISATA LOMBOK TIMUR

Pada tanggal 28 juni yang lalu, Bupati Kabupaten Lombok Timur bersama Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur melantik Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Periode 2021-2025. Walaupun di dalam proses perekrutannya menuai banyak sorotan dan kritikan dari pelaku pariwisata.



Dalam sambutannya saat melantik pengurus BPPD tersebut, Bupati Lombok Timur menekankan fungsi dan tugas dari BPPD. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2011, tugas dan fungsi BPPD yaitu menjaga citra pariwisata Lombok Timur, meningkatkan kunjungan wisatawan, kreatif dan kolaboratif di dalam mencari solusi penganggaran di luar anggaran daerah, dan melakukan riset untuk menjadi pijakan di dalam mengambil kebijakan – kebijakan strategis terkait promosi pariwisata. Kepengurusan BPPD yang baru memang menghadapi tantangan yang berat di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan Bupati dan para pelaku pariwisata khususnya di Lombok Timur.

Kenapa penulis mengatakan tantangan kepengurusan BPPD periode 2021-2025 ini cukup berat? Hal ini didasarkan pada kondisi kita saat ini yang menghadapi bencana non alam yaitu Pandemi Covid-19.

Semua negara dan daerah yang mengandalkan pendapatannya dari sektor pariwisata mengalami krisis yang cukup parah. Hal ini juga berdampak kepada pariwisata Lombok Timur. Berdasarkan data dari UNWTO (*The World Tourism Organization*), sejak Januari hingga Juni 2020 pariwisata di seluruh dunia kehilangan sekitar 440 juta turis. Dilansir dari detik.com, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mencatat pada masa sebelum pandemi terdapat sekitar 18 juta wisatawan yang mengunjungi Indonesia, namun rata-rata wisatawan yang datang pada tahun 2020 hanya mencapai 2 juta hingga 4 juta wisatawan.

Beberapa daerah di Indonesia dengan pemasukan utama berasal dari sektor pariwisata mengalami kerugian yang besar. Contohnya adalah Bali yang dilaporkan memiliki kerugian hingga 9 triliun rupiah setiap bulannya. Indonesia diperkirakan kehilangan devisa sebesar 14,5-15,8 miliar dolar AS karena adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara.

Oleh karena itu tantangan dari perkembangan pariwisata di era pandemi adalah adanya perubahan dari *market demand* yang perlu untuk diantisipasi dan dihadapi, serta kompetisi di tiap destinasi wisata. Era pandemi membuat preferensi berwisata menjadi berubah sehingga hal ini perlu untuk diperhatikan dan diantisipasi. Selain itu, kondisi pelayanan dan fasilitas di destinasi juga

masih dirasa perlu untuk ditingkatkan, terlebih lagi pada masa pandemi ini diperlukan kepastian bagi masyarakat untuk dapat berwisata dengan aman dan nyaman.

Tak bisa dipungkiri bahwa alasan pandemi masih menjadi isu utama sehingga penyediaan lokasi wisata dengan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap protokol kesehatan sangat perlu untuk diadakan. Berbagai macam penerapan prosedur terkait higienitas menjadi penting untuk digalakkan bagi seluruh pelaku wisata. Jika hal ini dilakukan, tentu diharapkan akan dapat menambah tingkat kepercayaan wisatawan terhadap destinasi wisata di Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki potensi wisata yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh dunia.

Lombok Timur kedepannya akan menjadi penyangga bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dengan pariwisata andalannya yaitu event Motogp-nya. Untuk itu sejak awal Lombok Timur harus mampu dan paham apa saja kebutuhan yang harus dipersiapkan.

Namun sejak awal juga Lombok Timur harus mampu melepaskan diri dari bayang-bayang pembangunan pariwisata Lombok Tengah. Konsep pengembangan pariwisata terintegrasi harus bisa menjadi perekat kedepannya.

Selain itu, arah pembangunan sektor pariwisata Lombok Timur yang masih belum jelas juga akan membuat kerja-kerja BPPD akan semakin berat. Sampai saat ini blue print pembangunan sektor pariwisata Lombok Timur masih menjadi tanda Tanya publik.

Beberapa waktu yang lalu di media online, salah seorang pemerhati pembangunan di Lombok Timur juga

menyoroti tentang bagaimana konsep pembangunan daerah pariwisata di kawasan ekas dan daerah Selatan pada umumnya.

Kita tidak boleh lemah dengan kondisi saat ini. Kita harus mampu melihat peluang yang ada. Dan menjadikan peluang tersebut sebagai kekuatan baru bagi pembangunan sektor pariwisata Lombok Timur. Lalu apa saja peluang itu?.

Saat ini, Pemerintah pusat sedang berupaya menyiapkan berbagai program untuk menyelamatkan industri pariwisata di Indonesia. Beberapa upaya seperti program penyediaan dana PEN (Program Pemulihan Ekonomi) yang dapat dimanfaatkan di sektor pariwisata, terutama bagi destinasi wisata prioritas nasional.

Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan Lombok pada khususnya mendapatkan berkah dari Program PEN tersebut. Pada bulan Maret yang lalu, Bapak Presiden telah mengumumkan bahwa NTB mendapatkan secara khusus dana segar tersebut. Dilansir dari beberapa media online yang ada NTB mendapatkan dana PEN Khusus tersebut sekitar Rp.5 Triliun.

Pemerintah juga berencana untuk memberikan program diskon pariwisata bagi wisatawan lokal yang akan diluncurkan pada tahun 2021 atau pada saat setelah vaksin covid-19 rampung. Diharapkan pergerakan dalam negeri dapat Kembali meningkat.

Hal ini sejalan dengan anjuran dari UNWTO yang menyatakan bahwa di masa pandemi negara-negara perlu fokus terlebih dulu terhadap pengembangan pariwisata untuk wisatawan lokal sehingga ketika situasi



sudah sepenuhnya dibuka untuk pasar mancanegara maka negara tersebut sudah menjadi lebih siap.

Di samping itu, penyelenggaraan protocol CHSE ( ) juga disiapkan oleh pemerintah. Protokol ini akan menjadi acuan serta program sertifikasi bagi seluruh pelaku usaha yang terlibat di sektor pariwisata. Kemenparekraf telah menyiapkan dana sebesar lebih dari 119 Miliar untuk program sertifikasi CHSE yang rencananya akan diberikan secara gratis melalui lembaga independen. Diharapkan dengan adanya sertifikasi CHSE, maka akan memberikan jaminan bagi para wisatawan bahwa mereka dapat berwisata dengan aman dan nyaman di masa pandemi.

Secara keseluruhan, tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti kapan pandemi akan berakhir sehingga berbagai upaya perlu dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari pandemi tersebut. Peluang yang ada harus dimaksimalkan dan tantangan

harus dapat dilewati dan diantisipasi dampak negatifnya. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari banyak pihak agar berbagai upaya dan kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk dapat menyelamatkan sektor pariwisata dapat menemui titik terang dan dapat mengembalikan neraca ekonomi negara yang terpuruk.

Untuk itu, BPPD Lombok Timur yang dengan Sumber daya yang baru dan masih segar harus mampu menjadi penggerak utama roda pembangunan pariwisata di Lombok Timur. Penulis dapat mengibaratkan bahwa pandemi ini menjadi sebuah langkah awal yang baru bagi semua daerah untuk menyusun strategi pembangunan pariwisatanya. Kita harus dapat memanfaatkan momen awal ini untuk menjadi pemenang. Jangan sampai kita sejak awal kalah di start dan kalah juga di finisnya.



## **BELAJAR DARI KEGAGALAN DESA TETE BATU DALAM AJANG LOMBA DESA WISATA UNWTO**

Setelah diumumkan finalis dalam Acara tahunan oleh digelar United Nation World Tourism Organization (UNWTO) ini merupakan ajang bergengsi di dunia pariwisata dunia tadi malam (2/12/2021) di laman website resminya, kita harus belajar banyak dari kegagalan desa Tetebatu.

Memang tetebatu merupakan Desa yang menjadi wakil kita dari Lombok Timur dan menjadi harapankita kedepannya. Harapan dalam arti sebagai salah satu penggerak pariwisata dan penggerak Desa wisata kedepannya jika tetebatu Lolos.

Namun, hasil sudah diumumkan. Kita sebagai masyarakat Lombok Timur pun harus rela menerimanya. Akan tetapi, ini harus kita jadikan “cambuk” penyemangat untuk berbenah lagi. Dimana kekurangannya, apa kendala teknisnya. Mari kita sama sama perbaiki.

Ada sebuah pepatah Lombok yang mengatakan “***Panas-panas tain manok***”, kita jangan sampai seperti itu. Di awal-awal diumumkannya Tetebatu mewakili Indonesia di ajang UNWTO, semua bereforia. Semua mengambil peran untuk berbuat. Bahkan, Pemerintah Daerah Propinsi dan pemerintah Kabupaten seolah-olah berlomba-lomba ingin mencari panggung.

Semua dinas, focus diminta berbuat di tetebatu. Akan tetapi, belum ada yang melakukan sesuatu memiliki konsep jelas dan berkelanjutan. Yang penting berbuat dan yang penting ada yang dilaporkan kepada pimpinannya.

Hal ini jelas kelihatan dari model program yang dikerjakan. Semuanya instan. Apalagi dua bulan terakhir ini, pemerintah propinsi malah melupakan Tetebatu, Pemerintah Propinsi kembali ke lokasi lain dan focus juga disana. Lokasi itu, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Mandalikan diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Evant Internasional. Yaitu menjadi tuan rumah ajang **World Superbike (WSBK)**. Dengan diadakannya WSBK ini di Lombok, kita seolah-olah melupakan Tetebatu. Atau memang kita sebagai Tuan rumah baik masyarakat maupun pemerintah daerah belum siap jika menghadapi lebih dari satu event Internasional.

Hal ini, harus menjadi renungan kita bersama untuk

berbenah. Tahun 2022 ini kita pun sudah mempromosikan diri melaksanakan beberapa kegiatan Evant internasional. Jika tidak berbenah, takutnya akan membuat kita tidak bisa maksimal sehingga meninggalkan kesan buruk nantinya.

Mari kita belajar di tetebatu. Dimana letak kekurangan kita. Apakah di tingkat pengelolanya, di tingkat masyarakatnya atautkah kita belum menampilkan sesuatu yang unik dari Tetebatu. Jangan kita membuang energy untuk memikirkan sesuatu yang tidak teknis. Seperti ribut karena Menteri Pariwisata tidak berkunjung ke Tetebatu, misalnya. Atau malah Kepala Dinas Pariwisata masih sibuk dengan dukung mendukung calon presiden?.

Energy kita banyak terbuat untuk hal-hal yang tidak substansi. Sehingga kita melupakan inti dari apa yang harus kita selesaikan. Mari kita coba mendalami kriteria dalam ajang UNWTO ini.

Tujuan utama UNWTO adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor untuk pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.

UNWTO telah membantu para anggotanya dalam industri pariwisata dunia, yang berperan sebagai faktor penting dalam perkembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi pembangunan lingkungan dan warisan sejarah, serta mendukung perdamaian dan saling pengertian antar negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan

berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperjuangkan kesetaraan gender, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Program-program pengembangan kepariwisataan oleh UNWTO kontribusi langsung bagi keberhasilan pembangunan milenium (MDGs) MDG 1 (MDG 1), MDG 3 (kesetaraan gender), MDG 7 (kelestarian lingkungan), dan MDG 8 (kemitraan global untuk pembangunan) .

Suka tidak suka saat ini sektor pariwisata telah menjadi primadona baru didalam pembangunan NTB. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, misalnya dengan menggalakkan pengembangan desa wisata, penyelenggaraan acara atau event pariwisata, pembangunan infrastruktur pariwisata dan pendukung dibangun serta ditata yang dimaksudkan agar wisatawan merasa betah berlama-lama di NTB. Semua itu tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak terhadap kontribusi sektor pariwisata pada berbagai aktivitas perekonomian NTB lainnya.

Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB saat sedang semangat-semangatnya mengembangkan sektor pariwisatanya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui pengembangan desa wisata.

Pemerintah daerah tentunya memiliki asumsi bahwa melalui pengembangan desa wisata maka, harapan dan tujuan dari pemerataan pembangunan ekonomi daerah Lombok Timur dapat diwujudkan. Selain itu, melalui

desa wisata diharapkan akan menciptakan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan, ujungnya adalah pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.

Namun, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Lombok Timur ini diikuti oleh kebijakan anggaran?. Sampai saat ini, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC) kebijakan anggaran dalam bidang pariwisata masih belum maksimal dilakukan oleh Pemimpin daerah yaitu Bupati Sukiman.

Tiga tahun terakhir, anggaran dibidang pariwisata di Lombok Timur tidak pernah sampai 3 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini menunjukkan bahwa bupati Lombok Timur hanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya regulasi dan belum diikuti oleh kebijakan penganggaran. Kalau dalam bahasa nyelenehnya “Nafsu besar tenaga kurang”.

Masih ada waktu, jika pemerintah daerah menginginkan sebuah perbaikan tata kelola pariwisata di Lombok Timur. Tentunya dengan melihat dan belajar dari pengalaman yang ada di Tetebatu.

Sampai dengan bulan September 2021, setidaknya terdapat 91 desa di Lombok Timur yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) sebagai desa wisata. Desa wisata memiliki empat klasifikasi, mulai dari rintisan, berkembang, maju, dan mandiri dengan indikator berupa jumlah kunjungan, industri pariwisata yang berkembang, kesiapan keterampilan dan sumber daya manusia (SDM), diversifikasi produk dan aktivitas wisata, serta amenities pariwisata.

Untuk dapat dikatakan sebagai desa wisata setidaknya harus dapat memenuhi berbagai unsur, antara lain seperti memiliki objek wisata alam, budaya, wisata buatan/ekonomi kreatif, dan tentunya juga harus didukung oleh adanya atraksi, akomodasi serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Yang paling penting dari desa wisata adalah adanya unsur kearifan lokal serta partisipasi semua unsur masyarakat.

Keterlibatan semua pihak mutlak dilakukan dalam dunia pariwisata. Karena pariwisata akan berjalan sesuai dengan relnya jika semua terlibat. Namun tetap Politik anggaran di bidang pariwisata menjadi keharusan dan itu bolanya ada di pemerintah daerah. Mari kita jadikan Tete Batu ini menjadi sebuah awal dan jangan menjadi akhir pengembangan pariwisata di Lombok Timur.

# AIR DAN PARIWISATA: TANTANGAN DAN PELUANG

**P**ada semua aspek kehidupan, air merupakan bagian yang sangat fundamental. Air memiliki keterkaitan dengan pilar pembangunan berkelanjutan, karena mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Begitu pula dalam berbagai sektor kehidupan yang mendukung capaian dalam pembangunan berkelanjutan, air erat sekali hubungannya dengan iklim, energi, lingkungan, ketahanan pangan, kemiskinan, kesetaraan gender dan, kesehatan.

Begitu pula dalam pengembangan dan pembangunan sektor

pariwisata, air berhubungan dengan banyak destinasi pariwisata seperti, pantai, danau, sungai, air terjun, kolam renang, dan berbagai destinasi pariwisata yang menawarkan adanya aktivitas yang terkait dengan air. Sumber daya air juga menjadi bagian penting dalam industri pariwisata, terutama pada sektor perhotelan dan restoran. Dalam mempersiapkan makanan, membersihkan ruangan, mandi, dan berbagai fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh hotel dan restoran.

Namun, di satu sisi industri pariwisata juga memberikan dampak negatif kepada lingkungan



air, seperti polusi atau pencemaran, penurunan kualitas air, dan kerusakan terumbu karang. Untuk itu, dalam mengelola industri pariwisata sangat penting untuk dapat berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya air, termasuk dalam upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dan memaksimalkan manfaat dari keberadaan sumber daya air untuk digunakan dalam industri pariwisata secara berkelanjutan.

### **Sumber Daya Air sebagai Tren Daya Tarik Utama**

Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyebutkan bahwa sejak tahun 2022 yang lalu, sektor pariwisata di NTB kembali menggeliat setelah dua tahun lamanya terdampak oleh pandemi Covid-19. Tahun 2022 jumlah wisatawan yang datang ke NTB sebanyak 1,376,295 wisatawan, lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, yaitu 400,595 wisatawan dan 964,036 wisatawan.

Saat ini desa wisata menjadi tren pengembangan pariwisata dan menjadi salah satu program unggulan dari pemerintah Provinsi NTB. Pengembangan desa wisata dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan, memperkuat pariwisata daerah secara keseluruhan. Setidaknya hingga tahun 2022, telah terdapat 153 desa wisata di seluruh wilayah NTB<sup>1</sup>.

Dalam pengalaman penulis terkait dengan desa wisata, khususnya desa wisata yang ada di Pulau Lombok, keberadaan sumber daya air sebagai tempat rekreasi atau destinasi wisata saat ini telah menjadi salah satu daya tarik utama dalam menarik wisatawan. Berbagai pembangunan infrastuktur dalam mendukung keberadaan tempat rekreasi di desa wisata itu terus bermunculan dimana, tentunya akan memberikan dampak terhadap tata ruang dan lingkungan di daerah yang menjadi lokasi destinasi pariwisata itu. Kelestarian sumber daya air harusnya juga menjadi perhatian dari para pengelola destinasi wisata yang ada di setiap desa wisata tersebut, karena hal ini terkait dengan ketersediaan dan penggunaan sumber daya air yang apabila tidak mampu dikelola dengan baik akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Adapun beberapa dampak negatif yang perlu untuk dipikirkan oleh desa wisata yang menjadikan sumber daya air sebagai daya tarik utama menarik

---

1 <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/06/04/2022/dispar-sebut-153-desa-wisata-ntb-siap-bersaing-di-adwi-2022/>

kunjungan wisatawan, antara lain adalah; 1) peningkatan penggunaan air dapat menurunkan kualitas air dan pencemaran pada sumber daya air; 2) pengambilan air dalam jumlah yang banyak akan memberikan dampak terhadap adanya penurunan ketersediaan air karena hal tersebut mengganggu ekosistem air dimana, dalam jangka waktu yang lama juga akan mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat sekitar; 3) sumber daya air sebagai daya tarik destinasi wisata cenderung memiliki risiko terhadap kecelakaan air, seperti tenggelam akibat kurangnya pengawasan dan fasilitas keselamatan yang memadai; 4) meningkatnya jumlah wisatawan di desa wisata yang mengandalkan sumber daya air sebagai daya tarik utama dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti erosi tanah, kerusakan flora dan fauna, dan polusi air. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan lingkungan di sekitar sumber daya air tersebut; dan 5) peningkatan jumlah wisatawan di desa wisata yang mengandalkan sumber daya air sebagai daya tarik utama juga dapat menimbulkan konflik antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Pengambilan sumber daya air yang berlebihan oleh wisatawan dapat merugikan masyarakat sekitar yang bergantung pada sumber daya air tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

Untuk itu, dalam pengembangan desa wisata yang menjadikan sumber daya air sebagai daya tarik utamanya perlu untuk memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar yang menjadi lokasi desa wisata. Dalam hal ini, perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat untuk menjaga keseimbangan

tersebut, seperti pengelolaan sumber daya air yang baik, pengawasan aktivitas wisatawan, serta pemberian edukasi pada wisatawan

## **Pariwisata, Air, dan Inklusi Sosial**

Air dan pariwisata memiliki hubungan erat yang saling terkait satu dengan lainnya. Air yang bersih dan terjaga kebersihannya sangat penting untuk pariwisata yang berkelanjutan. Untuk itu, dalam pengelolaan pariwisata sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan, sehingga tetap menjadi daya tarik destinasi wisata dalam pengembangan pariwisata.

Untuk itu juga, pengembangan pariwisata dimana salah satunya melalui desa wisata perlu untuk memasukkan aspek-aspek inklusif untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pengembangan pariwisata perlu untuk memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat lokal dan kelompok rentan yang ada di lokasi desa wisata tersebut. Pengembangan desa wisata seharusnya dapat melibatkan masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan, seperti kelompok difabel didalam proses pemberdayaan dan pengambilan keputusan tentang pengembangan pariwisata di desa. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Penggunaan air sebagai daya tarik utama pengembangan destinasi wisata harus mengarah kepada upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan

inklusif. Dimana selain manfaat ekonomi, pengelolaan air yang berkelanjutan juga akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat rentan yang ada di wilayah tersebut dalam kemudahan mengakses air bersih dan sanitasi yang memadai.

Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu pariwisata yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua orang, termasuk kelompok rentan dan marjinal, serta menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat.

Pembangunan pariwisata telah menjadi salah satu fokus pembangunan di NTB sebagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Namun, pembangunan pariwisata yang tidak terkendali dapat mengancam keseimbangan lingkungan dan berdampak negatif pada masyarakat setempat.

Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus menjadi prioritas dalam pembangunan pariwisata. Upaya-upaya seperti pengelolaan yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat setempat harus diprioritaskan.

Selain itu, pemerintah daerah dan pelaku pariwisata juga perlu memperhatikan dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh pembangunan pariwisata. Dalam hal ini, partisipasi aktif masyarakat setempat sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Kesimpulannya, pembangunan pariwisata harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan, serta memperhatikan dampak sosial dan budaya yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pariwisata dapat menjadi sumber daya ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.



www.lrcfoundation.com

Jalan Raya Mataram Masbagik KM. 45  
Perumahan Bumi Catra Regency Blok. B3 No. 8  
Semat, Desa Danger, Kecamatan Masbagik,  
Kabupaten Lombok Timur - NTB  
Email : info.lrc2014@gmail.com

ISBN 978-623-92952-4-0

